



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

STRATEGI PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

NAMA : SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

N I P : 19700416 199503 2 001

KELAS : B

N D H : 04

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

ABSTRAK

STRATEGI PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Oleh : Sri Purwaningsih, SH., MAP

Mentor : Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si
Coach : Drs. Domoe Abdie, M.Si

Proyek perubahan dengan judul : " Strategi Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dalam Pencapaian Program Wajib Belajar 12 Tahun", dilaksanakan dalam rangka pemenuhan syarat dalam Diklat kepemimpinan Tingkat II. Proyek perubahannya ditaukan dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Implementasi proyek perubahannya dilakukan dengan pendekatan system, yang di dalamnya ada input, proses, dan output.

Hal – hal yang melatar belakangi proyek perubahan ini adalah kondisi eksisting sampai saat ini wajib belajar 12 tahun belum tercapai di 34 Provinsi dan 513 Kabupaten/Kota, dan hanya 1 Kabupaten/Kota yang telah mencapainya. Bahkan ada 31 Kabupaten/Kota yang belum mencapai wajib belajar 6 tahun padahal sudah dicanangkan 35 tahun yang lalu. Padahal pendidikan merupakan amanat perundang-undangan yang tertuang dalam UUD 1945, UU No 23 Tahun 2014, PP No 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 100 tahun 2018, dan Permendikbud No 32 tahun 2018, serta sudah tercantum dalam Dokumen Perencanaan nasional berupa RPJMN dan Renstra Kemendikbud 2015 – 2019.

Kerangka sistemik yang dibangun dalam proyek perubahan ini adalah Kementerian/Lembaga *stakeholder* Pendidikan dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota mampu mengentaskan anak usia sekolah yang tidak sekolah menjadi sekolah; sinkronisasi yang berkesinambungan antar jenjang Pendidikan agar anak usia sekolah tidak terputus sekolahnya; satuan Pendidikan yang terakreditasi, dan terjadinya pemenuhan guru antar satuan Pendidikan, dan antar daerah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Kerangka sistemik yang dibangun ini dalam rangka mencapai target sasaran partisipasi sekolah anak usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan tercapai 100% di semua daerah kabupaten/Kota maupun daerah Provinsi. Pada akhirnya diharapkan tercapainya wajib belajar 12 tahun.

Inovasi yang dituangkan dalam proyek perubahan ini adalah tersusunnya instrument roadmap SPM bidang pendidikan yang dapat diterapkan oleh daerah. Penyusunan instrument ini melibatkan kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Implikasi dari adanya roadmap ini adalah adanya inovasi baru berupa pemadanan data untuk mendapatkan data Anak Tidak Sekolah (ATS); pembangunan aplikasi penerapan SPM yang dapat diakses oleh daerah, dan terlaksananya koordinasi intensif antara K/L terkait, dan terlaksananya Bimbingan Teknis penerapan SPM bidang pendidikan di 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota.

Adanya inovasi proyek perubahan yang dilakukan dalam proses jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, untuk memberikan kepastian pencapaian program wajib belajar 12 tahun di seluruh wilayah NKRI. Serangkaian

kegiatan telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merencanakan tindak lanjut kegiatan untuk mencapai tujuan jangka menengah, dan jangka Panjang.

Lesson Learned yang didapatkan dari proyek perubahan ini antara lain: koordinasi pemadanan data penduduk usia sekolah antar K/L untuk mendapatkan anak tidak sekolah; memberikan inisiasi tersusunnya instrument roadmap penerapan SPM, inisiasi pembangunan aplikasi penerapan SPM oleh Kemendikbud, terjadinya soliditas tim pusat dalam mengkawal penerapan SPM Pendidikan di daerah melalui bimbingan teknis, dan adanya penambahan wawasan stakeholder pemangku Pendidikan dalam menerapkan SPM Pendidikan yang melahirkan sikap dan komitmen untuk melaksanakan penerapan SPM Pendidikan sampai tercapainya program wajib belajar 12 tahun yang menghasilkan SDM Indonesia berpendidikan minimal Pendidikan menengah dan memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang memiliki daya saing regional maupun internasional.

Key Words : Strategi, Roadmap, Anak Tidak Sekolah, dan Wajib Belajar.